

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SERTIFIKAT GANDA

Nama: Anton Bagus Sasmito

Nim : 212374201023

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul'Ulum

ABSTRAK

Pengaturan tentang tanah harus di tata dan dibuatkan perencanaannya dengan hati-hati dan penuh dengan kearifan. Adanya persengketaan di bidang pertanahan ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan konflik ini bisa sampai kepada masing-masing ahli waris yang bersengketa, terkadang konflik tentang bidang pertanahan ini juga dapat menimbulkan banyak korban yang terlibat di dalamnya, sehingga adanya suatu persoalan sertifikat ganda dikemudian hari hal ini menjadi pedoman kehati-hatian dalam melakukan penerbitan sebuah sertifikat hak milik, terutama dalam peralihan adanya jual-beli yang mana data yuridis masih berbentuk letter c, ini harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ke pihak Badan Pertanahan Nasional guna untuk meminimalisir atas kejadian adanya sertifikat ganda, jika hal ini tidak dilakukan kemungkinan adanya terbit sertifikat ganda menjadi sangat jelas walaupun terbitnya sertifikat merupakan kewenangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional dan apabila pihak atas pemilik dari pada sertifikat merasa dirugikan atas perbuatan tersebut langkah yang harus dilakukan ialah menempuh upaya hukum administrative melalui mediasi ke BPN, jika upaya mediasi tidak mendapatkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, maka atas putusan mediasi tersebut dibuat dasar untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sehingga akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi bahasan didalam penulis skripsi ini.

Kata kunci: Sertifikat Ganda, Perlindungan Hukum Adanya Sertifikat Ganda, Upaya Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda.

LEGAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR LAND RIGHTS OWNERS IN MULTIPLE CERTIFICATES

Name: Anton Bagus Sasmito

Nim : 212374201023

Legal Studies Program, Faculty Of Law, Darul'ulum University

ABSTRACT

Land arrangements must be arranged and plans made carefully and full of wisdom. The existence of disputes in the land sector can give rise to prolonged conflicts between members of the disputing community, this conflict can even reach the respective heirs of the dispute, sometimes conflicts regarding the land sector can also lead to many victims being involved in it, so that there is a problem of double certificates in the future. This is a guideline for caution in issuing a property rights certificate, especially in the transition to buying and selling where the juridical data is still in the form of a letter c, this must be checked first. The National Land Agency aims to minimize the occurrence of duplicate certificates. If this is not done, the possibility of a double certificate being issued becomes very clear, even though the issuance of the certificate is within the authority of the National Land Agency and if the party who owns the certificate feels disadvantaged by this action, the step that must be taken is to take administrative legal action through mediation with BPN. If the mediation effort does not obtain an agreement between both parties, then based on the mediation decision, a basis is created for taking legal action through a lawsuit for cancellation to the State Administrative Court. This research uses the Statute Approach method so that it will obtain information from various aspects regarding the legal issues that are being tried to find answers. This legal approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the problems discussed by the author of this thesis.

Keywords: Dual Certificates, Legal Protection for the Existence of Dual Certificates, Efforts to Settle Dual Certificate Disputes.